PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# ABSTRAK

Kerukunan beragama telah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi persoalan yang silih-berganti hadir di Indonesia yang memiliki keragaman identitas agama. Di satu sisi agama menjadi sumber hal-hal baik dan damai, namun di sisi yang lain status sosiologis konkritnya menunjukkan kemungkinan adanya konflik. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kerukunan beragama dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun kelompok masyarakat, termasuk kampus. Dalam kenyataannya kasus-kasus yang mengoyak kerukunan beragama masih terus terjadi.

Dalam pengamatan, penelitian terkait dengan kasus kerukunan kerukunan beragama telah diteliti dilakukan dengan aneka pendekatan, khususnya sosial, ekonomi-politik, maupun hak asasi manusia. Penelitian ini mengambil satu kasus yang terjadi di Indonesia dan dilihat dari perspektif ideologi dalam kajian budaya. Kasus yang terjadi adalah kasus penolakan pendirian kantor klasis GKJ Gunungkidul, Yogyakarta, yang terjadi pada 2016 dan sampai penelitian ini dilakukan masih berlangsung kontestasinya.

Penelitian ini berusaha membongkar praktik ideologi dalam kasus tersebut melalui data dari dokumen-dokumen yang menggambarkan posisi para pihak yang berkontestasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori ideologi Althusser. Tiga kunci konsep ini adalah Aparatus Represi Negara (*Repressive State Apparatus*/RSA) dan Aparatus Ideologi Negara (*Ideological State Apparatus*/ISA), ISA sebagai situs perebutan dan perjuangan kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda dengan negara, dan ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kasus tersebut menunjukkan adanya ruang kontestasi terbuka dan beresiko antara ideologi kerukunan yang menghargai perbedaan maupun sebaliknya, sekaligus pemapanan ideologi kerukunan beragama oleh negara dalam makna tanpa konflik atau ketertiban.

**Kata kunci**: kerukunan beragama, ideologi, represif, persuasif, kontestasi, interpelasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# ABSTRACT

Religious harmony has become a part of history and has become a problem which is continually present in Indonesia, which has a diversity of religious identities. On the one hand religion is a source of good and peaceful things, but on the other hand its concrete sociological status indicates the possibility of conflict. Therefore, efforts to realize religious harmony are carried out by various parties, both government, religious institutions, and community groups, including the campus. In reality, cases which have ravaged religious harmony continue to occur.

In his observations, research related to the case of religious harmony has been investigated with various approaches, particularly social, political economy, and human rights. This study takes one case that occurred in Indonesia and viewed from an ideological perspective in cultural studies. The case that occurred was a case of rejection of the establishment of the GKJ Gunungkidul, Yogyakarta base office, which occurred in 2016 and until this research was conducted the contestation was still ongoing.

This research attempts to dismantle the ideological practices in the case through data from documents that describe the position of the parties to the contestation. The theory used to analyze is Althusser's ideological theory. The three key concepts are the Repressive State Apparatus (RSA) and the Ideological State Apparatus (ISA), ISA as a site of struggle and struggle for groups that have ideologies that are different from the state, and ideologies interpret individuals as subjects.

The conclusions obtained from the case study show that there is an open and risky contestation space between harmony ideologies that value differences and vice versa, as well as the establishment of religious harmony ideology by the state in a meaning without conflict or order.